

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Globalisasi yang terjadi di setiap belahan dunia telah memberikan dampak yang sangat besar terhadap proses kehidupan yang ada pada era sekarang ini. Tidak terkecuali dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang merupakan salah satu pengaruh dari globalisasi telah menawarkan solusi untuk mempermudah akses sosialisasi yang dilakukan oleh masyarakat di kehidupan sehari-hari. Perkembangan ini juga tentunya merupakan sebuah tuntutan bagi masyarakat untuk tetap dapat memperoleh informasi yang akurat setiap harinya.

Selain masyarakat umum, tentunya hal ini juga dapat mempengaruhi elemen pemerintahan sebagai pengendali sebuah negara. Di negara-negara maju, melakukan proses di dalam pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi telah menghasilkan mekanisme birokrasi yang baru dan tentunya lebih efisien serta efektif. Teknologi tentunya dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kinerja pemerintah dalam melayani masyarakat juga untuk dapat mempermudah pekerjaan yang dilakukan dengan melibatkan institusi pemerintah lainnya.

Tekhnologi komputerisasi merupakan salah satu cara atau alat yang dapat membantu penyelesaian suatu pekerjaan. Setiap perusahaan baik dalam skala kecil maupun besar dapat dipastikan membutuhkan teknologi canggih seperti komputer baik yang digunakan secara system manual maupun dengan menggunakan data elektronik. Komputer dapat digunakan perusahaan untuk membantu pengolahan data yang dimiliki perusahaan atau instansi tersebut.

Penerapan teknologi yang dilaksanakan di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat berupaya menciptakan pemerintah yang akuntabel, transparan, dan dapat dipercaya. Dasar hukum yang telah mengatur dalam beberapa keputusan, diantaranya adalah Panduan Pembangunan Infrastruktur Portal Pemerintah dan Panduan Manajemen Sistem Dokumen Elektronik Pemerintah. Kemudian pada tahun 2006, pemerintah membentuk Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional (Detiknas) yang berada dalam Keputusan Presiden No. 20/2006.

Salah satu program yang memanfaatkan teknologi informasi sebagai unsur yang penting didalamnya dan sedang dilaksanakan pemerintah Indonesia dalam mendukung penerapan demokrasi adalah Sistem Informasi Manajemen atau yang biasa disingkat SIM.

Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) adalah sistem yang mampu memberikan informasi data-data pegawai pada suatu perusahaan maupun instansi yang saling berinteraksi mencapai tujuan yang telah ditargetkan. SIMPEG menangani pengelolaan data kepegawaian khususnya meliputi : pendataan pegawai, BKD, proses perencanaan dan formasi kepegawaian, penggajian, penilaian angka kredit, mutasi pegawai, dan sistem pelaporan. Secara umum, tujuan Dari SIMPEG dalam lingkup pemerintahan dilaksanakan dengan tujuan untuk mendukung sistem manajemen pegawai yang rasional dan pengembangan sumber daya manusia di aparatur pemerintahan, mewujudkan data kepegawaian yang mutakhir dan terintegrasi, menyediakan informasi pegawai yang lebih akurat untuk memenuhi keperluan perencanaan, pengembangan, kesejahteraan dan pengendalian pegawai serta untuk membantu kelancaran pekerjaan di bidang kepegawaian.

Dengan adanya Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) ini, diharapkan agar memberikan beberapa manfaat, antara lain yaitu untuk pelacakan informasi data seorang pegawai akan mudah dan cepat, pembuatan laporan yang bersifat rutin dan berkala akan cepat dan mudah dikerjakan, memudahkan suatu pekerjaan yang berhubungan dengan kepegawaian, mendapatkan informasi tentang keadaan pegawai dengan cepat dan akurat, serta untuk mengetahui dan merencanakan penyebaran pegawai.

Dalam pelaksanaan didalamnya tatanan pemerintahan di Indonesia baik pusat maupun daerah juga menggunakan Sistem Informasi Manajemen agar dapat mempermudah proses dan akses pelayanan, Dalam keputusan Menteri Dalam Negeri No. 17 Tahun 2000 disebut bahwa :''Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) merupakan suatu totlitas terpadu yang terdiri dari perangkat pengolah meliputi pengumpu prosedur, tenaga pengolah dan perangkat lunak, perangkat penyimpanan meliputi pusat data dan bank data serta perangkat komunikasi yang saling berkaitan, saling ketergantungan dan saling menentukan dalam rangka penyediaan informasi di bidang kepegawaian''.

Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian atau yang biasa disingkat SIMPEG sendiri diperlukan oleh pemerintah daerah karena SIMPEG dapat memudahkan mekanisme kepegawaian yang meliputi pendataan pegawai, pengolahan data, prosedur, tata kerja, sumber daya manusia dan teknologi informasi untuk menghasilkan informasi yang cepat, lengkap dan akurat dalam rangka mendukung administrasi kepegawaian khususnya di Pemerintah Daerah. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 diterangkan bahwa daerah di Indonesia dibagi menjadi daerah dan provinsi, daerah provinsi dibagi lagi menjadi daerah yang lebih kecil. Daerah-daerah tersebut bersifat otonom atau bersifat administratif. Artinya daerah-daerah tersebut menjalankan pemerintahan atau urusan rumah tangganya sendiri namun sesuai aturan yang telah ditetapkan. Tujuan pemberian otonomi kepada

daerah berorientasi kepada pembangunan yang meliputi semua aspek kehidupan di masyarakat, baik ekonomi, sosial, budaya, hukum, dan lain-lain. Dengan demikian, otonomi berarti kewajiban yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah, dari pada hak. Hal ini menunjukkan bahwa daerah harus melakukan kewajibannya secara penuh tanggung jawab demi tercapainya tujuan negara.

Hal tersebut menjadikan Sistem Informasi manajemen Kepegawaian yang terdapat di lingkungan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat menjadi salah satu pelaksanaan kebijakan yang dilakukan pemerintah daerah agar dapat membantu urusan kepegawaian daerah secara mandiri dan sifatnya aktual juga terstruktur. Ketentuan dari Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian berada di dalam keputusan Menteri dalam Negeri No. 17 Tahun 2000 tentang Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Departemen dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah. Dasar hukum SIMPEG lainnya yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2011 tentang pedoman Pengembangan Database Pegawai Negeri Sipil.

Pada penerapan dan kenyataannya memang harus diakui bahwa SIMPEG di instansi dan lembaga pemerintahan belum bisa berjalan sesuai dengan fungsi dan tujuannya secara ideal karena keterhubungannya dengan

teknologi mempengaruhi elemen-elemen di pemerintahan yang membutuhkan adaptasi dan waktu yang tidak singkat.

Kondisi yang ingin dicapai dari penerapan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian ini, diantaranya adalah seluruh data yang dihasilkan oleh SIMPEG menjadi terpusat dan mengurangi kemungkinan manipulasi data, SIMPEG dapat berfungsi meningkatkan kinerja dan meningkatkan fungsi layanan terhadap SKPD, form isian data dapat dibangun secara terintegrasi sehingga memudahkan operator di masing-masing SKPD, juga mewujudkan data kepegawaian yang mutakhir dan terintegrasi.

Dari penjelasan tersebut, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat yang sedang mengolah data kepegawaian seluruh pegawai di lingkungan Dinas tersebut kedalam SIMPEG masih menghadapi beberapa masalah.

Tabel 1.1

Jumlah Pegawai Di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat

No	Status Pegawai	Jumlah Pegawai
1	Pegawai Negeri Sipil	165
2	Calon Pegawai Negeri Sipil	2
3	Non Pegawai Negeri Sipil	40

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat

Dari data jumlah pegawai yang ada di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat pada dasarnya pegawai yang sudah berstatus Pegawai Negeri Sipil Data dirinya sudah harus terupdate di Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian, namun pada kenyataannya semua pegawai yang sudah berstatus Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat belum terupdate semua secara detail dan lengkap.

Kurangnya optimalisasi potensi aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian yang sesungguhnya mempunyai banyak manfaat bagi ketertudahan proses jenjang karier Pegawai Negeri Sipil. Pada dasarnya jenjang karier merupakan kenaikan pangkat atau jabatan Pegawai Negeri Sipil. Dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang didalamnya terdapat kebijakan mengenai sistem kepegawaian dan mutasi. Dalam peraturannya, kenaikan pangkat Pegawai

Negeri Sipil dapat dilakukan setiap 4 tahun sekali. Namun dalam proses ini belum dilaksanakan secara optimal, demikian pula dengan mutasi tidak dapat menggunakan SIMPEG akan tetapi dilakukan secara manual.

Dalam proses ini, Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian tidak mempunyai banyak peran, adapun formasi Pegawai Negeri Sipil yang akan dan sudah naik pangkat terdata di website Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian namun hanya sebagai database saja, bukan sebagai referensi dinas yang berkaitan dalam proses jenjang karier Pegawai Negeri Sipil. Selain itu, promosi pegawai untuk kenaikan jabatan yang lebih tinggi pada kenyataannya harus tetap mengendalikan pendekatan, dan juga harus melalui pengusulan oleh pimpinan Dinas terkait untuk dapat dipromosikan.

Permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian ini tidak dapat dihindari, pengumpulan arsip kepegawaian dari setiap Pegawai Negeri Sipil yang cenderung tidak cepat datanya diinput karena keterlambatan pengumpulan pembaharuan data dari para pegawai menjadi salah satu hambatan yang ada. Menurut Pelaksana Umum Kepegawaian di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, data kepegawaian yang menjadi persyaratan dalam penginputan data di Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian tidak begitu dianggap penting oleh Pegawai Negeri Sipil karena merasa telah menyerahkan data kepegawaian untuk keperluan pendataan e-PU PNS tahun sebelumnya,

sedangkan data kepegawaian yang dibutuhkan oleh SIMPEG berbeda, yaitu harus data kepegawaian terbaru dan lebih rinci, hanya mekanisme pendataannya saja yang mirip dengan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian.

Tentunya hal tersebut dapat menghambat proses penginputan data kepegawaian, juga mengakibatkan tidak akuratnya informasi kepegawaian yang ada di SIMPEG. Sedangkan data kepegawaian bersifat dinamis atau cepat berubah, seperti adanya pegawai yang mutasi atau naik pangkat, jika datanya tidak cepat untuk diperbarui maka dapat mengakibatkan data kepegawaian yang cenderung outdated, juga dapat mempengaruhi nilai keakuratan data kepegawaian. Permasalahan ini berpengaruh terhadap pencapaian target. Dengan adanya permasalahan tersebut, tujuan penerapan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian yang merupakan media untuk menampung data-data kepegawaian yang terstruktur dan akurat tidak dapat terealisasi dengan baik.

Selanjutnya adalah kesadaran dari para pegawai dalam melaksanakan pembaharuan data dirinya ke dalam SIMPEG, beberapa pegawai masih saja ada yang belum dapat menggunakan aplikasi SIMPEG dan cenderung masih mengandalkan pelaksana kepegawaian. Selain itu, proses pengalihan arsip tercetak ke arsip digital yang rumit karena diharuskan menginput data kepegawaian secara rinci kedalam SIMPEG.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang telah dikemukakan dalam latar belakang ini, maka peneliti ini akan mengkaji dengan judul **“Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) Dalam Pengelolaan Data Pegawai Di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat.”**

B. Fokus Masalah

Penelitian ini dilakukan di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat. Dalam penelitian ini peneliti menemukan beberapa fokus masalah yaitu mengenai efektivitas dari penerapan sistem informasi manajemen kepegawaian dan hambatan yang terjadi dalam pengelolaan data pegawai.

C. Rumusan Masalah

Dari beberapa penjelasan yang dikemukakan pada latar belakang, maka ada beberapa yang harus ditarik kesimpulannya sehingga dirumuskan masalah penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana tingkat efektivitas penerapan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat.

2. Apa saja hambatan yang dihadapi dalam penerapan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) dalam pengelolaan data pegawai di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat.

D. Maksud dan Tujuan Penelitian

Dari Rumusan Masalah yang ada, dapat disimpulkan Maksud dari penelitian ini, antara lain :

1. Mengetahui tingkat efektivitas penerapan sistem informasi manajemen kepegawaian (SIMPEG) dalam pengelolaan data pegawai di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat.
2. Mengetahui apa saja hambatan yang dihadapi dalam penerapan sistem informasi manajemen kepegawaian (SIMPEG) dalam pengelolaan data pegawai di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat.

E. Manfaat dan Kegunaan Penelitian

Hasil Penelitian memiliki kegunaan yang bersifat teoritis dan praktis. Adapun kegunaan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis, hasil dari penelitian ini dimanfaatkan untuk mengembangkan teori-teori yang peneliti gunakan yang relevan dengan permasalahan dalam penulisan ini dan dapat memberikan kontribusi

positif khususnya mengenai penerapan sistem informasi manajemen dan kepegawaian (SIMPEG) dan pengelolaan data pegawai.

2. Kegunaan Praktis, diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat sebagai masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya bagi pegawai Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat.

F. Kerangka Pemikiran

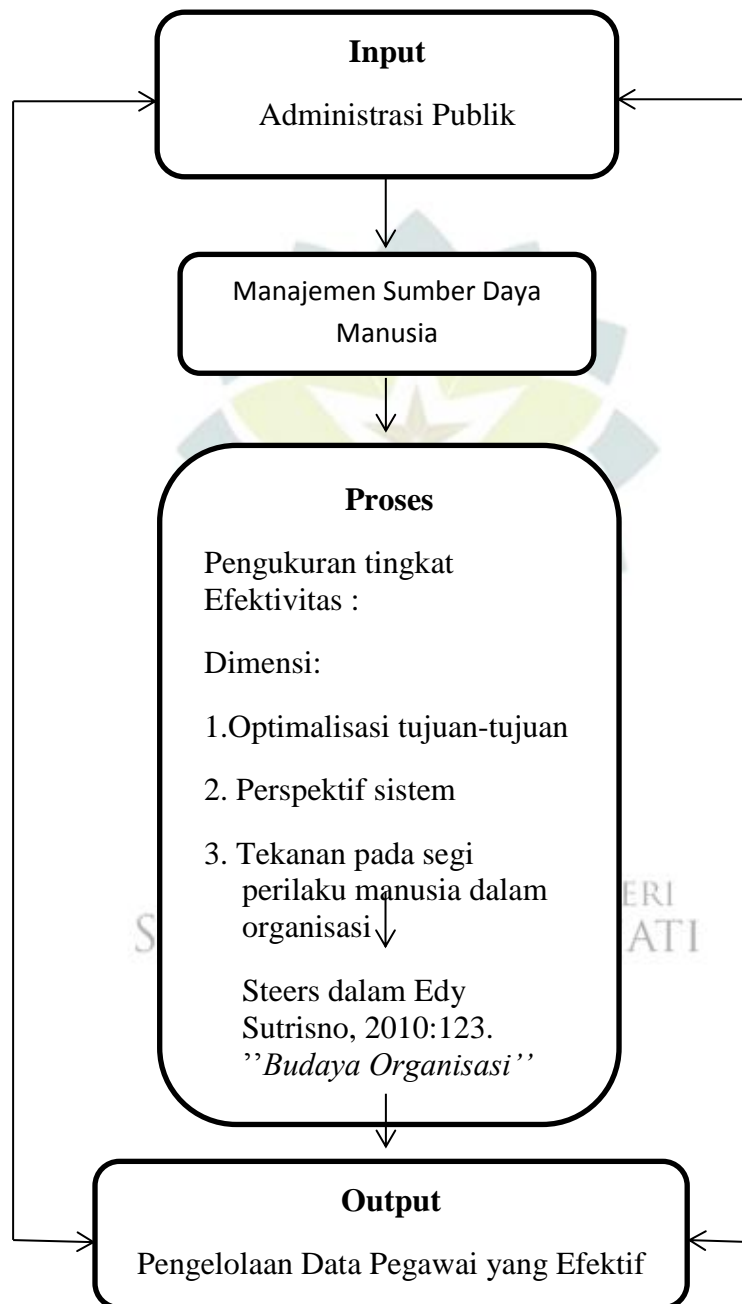
Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian atau yang biasa disingkat SIMPEG sendiri diperlukan oleh pemerintah daerah karena SIMPEG dapat memudahkan mekanisme kepegawaian yang meliputi pendataan pegawai, pengolahan data, prosedur, tata kerja, sumber daya manusia dan teknologi informasi untuk menghasilkan informasi yang cepat, lengkap dan akurat dalam rangka mendukung administrasi kepegawaian khususnya di Pemerintah Daerah. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Indonesia dibagi menjadi daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi lagi menjadi daerah yang lebih kecil. Daerah-daerah tersebut bersifat otonom. Artinya daerah-daerah tersebut menjalankan pemerintahan atau urusan rumah tangganya sendiri namun sesuai aturan yang telah ditetapkan. Tujuan pemberian otonomi daerah berorientasi kepada pembangunan yang meliputi semua aspek kehidupan di masyarakat, baik ekonomi, sosial, budaya, hukum, dan lain-lain. Dengan demikian, otonomi adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah.

Hal tersebut menjadikan Sistem Informasi manajemen Kepegawaian yang terdapat di lingkungan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat menjadi salah satu pelaksanaan kebijakan yang dilakukan pemerintah daerah agar dapat membantu urusan kepegawaian daerah secara mandiri dan sifatnya aktual juga terstruktur. Ketentuan dari Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian berada di dalam keputusan Menteri dalam Negeri No. 17 Tahun 2000 tentang Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Departemen dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah. Dasar hukum SIMPEG lainnya yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2011 tentang pedoman Pengembangan Database Pegawai Negeri Sipil.

Penelitian ini menggunakan teori efektivitas dari Steers dalam Edy Sutrisno (2010:123) mengatakan bahwa yang terbaik dalam meneliti tingkat efektivitas ialah memerhatikan secara serempak tiga indikator yang saling berkaitan, yaitu : 1. Optimalisasi tujuan-tujuan 2. Perspektif sistem dan 3. Tekanan pada segi perilaku manusia dalam susunan organisasi.

Tabel 1.1

Kerangka Pemikiran Penelitian



G. Proposisi

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka proposal dari penelitian ini adalah Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian dalam Pengelolaan Data Pegawai di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat yaitu ditentukan oleh pencapaian target, kemampuan adaptasi, kepuasan kerja dan tanggung jawab.

